

REFERENSI

- Ahmad, I. 2016. "Analisis Tingkat Kepatuhan Bendaharawan pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci)." Tesis. Universitas Andalas.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2011. "Bendaharawan Belum Patuh Pajak." 23 November. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.bpk.go.id/news/bendaharawan-belum-patuh-pajak>.
- Cheisviyanny, C. 2015. "Analisis Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan pemerintah Daerah Sebagai Pemungut PPN dan PPh Pasal 22 di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pada CV LPM, Distributor Motor Tiga Roda)." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi (InFestasi)*, Vol.11, No.1(Juni): 11-20. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=433543>.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi Keempat. London: SAGE Publications.
- Devano, S., dan Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013. *Bendahara Mahir Pajak*. Edisi Revisi, Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. "Gelapkan Pajak, Mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi Ditahan." 30 Juni. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.pajak.go.id/content/gelapkan-pajak-mantan-bendahara-dprd-kota-bekasi-ditahan>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan Tinggi*. Diakses pada 23 Maret 2016. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BAB%20III%20Bagaimana%20Pajak%20dalam%20Konteks%20Indonesia.pdf>
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I.R., dan Dara, A. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. Postur APBD. Diakses pada 20 Agustus 2016. http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/data-informasi/datin_data/
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2015*. Diakses pada 26 Agustus 2016. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/LAKIN_Perjanian%20Kinerja.pdf.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2015. *Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/kajian-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.
- Mardiasmo. 2002. "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah." *Jurnal Otonomi Daerah*. Th I, No.4 (Juni):1-14
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, D. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyo, A.A.A. 2013. "Analisis Tax Gap Antara Realisasi Penerimaan Pajak dengan Potensi Pajak dari Belanja APBD: Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010." Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Murtani, D. 2005. "Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan." *Economics Business Accounting Review*, Edisi I (November): 41-8.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2014 tentang Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2015 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti pemotongan/pemungutannya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasetyo, B. 2013. "Mantan Bendahara Disdikbud Gelapkan Pajak Rp5,7 Miliar." *Tribunnews.com*. 31 Oktober. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/31/mantan-bendahara-disdikbud-gelapkan-pajak-rp-57-miliar>.

- Ratnafuri, K., dan Herawati, N. 2012. “Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Vol.3, No.3 (Desember): 334-501. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/215/265>.
- Soemitro, R., dan Sugiharti, D.K. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Edisi Revisi I. Bandung: Refrika Aditama.
- Syani, P.A. 2015. “Analisis Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Pada Aspek Perpajakan: Studi Kasus di UIN Jakarta.” Tesis. Universitas Indonesia.
- Setyorini, N.L., Al Musadieg, M., dan Dewantara, R.Y. 2015. “ Analisis Kepatuhan Bendaharawan pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi).” *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*, Vol.5, No.1(April):1-4.
- Suandy, E. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sukardji, U. 2008. *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pemahaman dan Tinjauan Yuridis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Zakya, I., Andreas, dan Nurmayanti, P. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau).” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.7 (Desember): 48-57.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Diterjemahkan oleh M. Djazuli Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.